BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca Perang dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan Ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *High Politics* (isu poltik dan keamanan) kepada isu-isu *Low Politics* (misalnya, Hak Asasi manusia, Ekonomi, Lingkungan hidup, Terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *High Politics*. (Perwita dan Yani, 2005:5)

Hubungan Internasional yang terjadi di dunia dewasa ini salah satunya yang paling besar porsinya adalah mengenai bidang Ekonomi, dimana terjadi antara Negara-negara maju dengan Negara-negara yang sedang berkembang maupun Negara setara yang saling ketergantungan. Adapun untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi suatu Negara dapat dilakukan dengan suatu hubungan kerjasama antar Negara di bidang Ekonomi yang salah satunya dilakukan oleh Jepang dengan didirikannya EPA (*Economic Partnership Agreement).*

Economic Partnership Agreement (EPA), merupakan kerjasama ekonomi bilateral yang mulai didirikan Jepang 8 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2000, EPA sebetulnya merupakan konsep kerjasama Ekonomi global yang mau tidak mau harus dilakukan oleh suatu negara jika tidak ingin tertinggal, bahkan bisa menjadi korban dari perkembangan perdagangan Internasional.

Jepang saat ini sudah melakukan kesepakatan EPA dengan delapan Negara yakni, Mexico, Chili dan enam negara ASEAN (*Association of South East Asian Nation*), yaitu Singapura dan Thailand yang lebih dulu menandatangani EPA pada tahun 2002, Thailand pada tahun 2003, Malaysia pada tahun 2005, Filipina pada tahun 2006, Brunai Darussalam pada tahun 2006, dan Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2007. Bagi Jepang, abad 21 adalah abadnya Asia, sehingga fokus kebijakannya juga lebih meng-Asia, agar cepat diterima mitra Asianya, Jepang pun mengusung motto *Mutual Prosperity with Asia* (kesepakatan saling menguntungkan dengan Asia) lewat EPA. (http://www.pjinews.com, diakses 27 Oktober 2008)

IJ-EPA (*Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement*) merupakan parjanjian kerjasama Ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif. IJ-EPA adalah sebuah *Free Trade Agreement New-Age* (FTA babak baru) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO plus (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur WTO) ditambah peningkatan kapasitas (*Capacity Building)* sebagai bagian dari *Partnership Agreement* (kemitraan). (http://www.antaranews.com, diakses 16 Oktober 2008)

IJ-EPA adalah salah satu titik temu dari lobi-lobi kedua negara ini, saat penandatanganan kesepakatan IJ-EPA, disebutkan dalam pernyataan bersama bahwa Perjanjian ini menetapkan kerangka yang berhubungan dengan

perdagangan dan Investasi dalam bidang Sumber daya mineral dan Energi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan energi kedua negara.

Untuk memetik manfaat maksimal dari EPA Indonesia tentu harus memberikan sejumlah konsesi. Jepang meminta akses yang luas untuk perdagangan jasa, pengadaan pemerintah (*government procurements*), dan perlindungan hak milik intelektual. Selain itu, Jepang meminta Indonesia untuk lebih menjamin pasokan energi dan sumber daya mineral. Jaminan bisa saja diberikan asalkan tidak mengganggu kepentingan pasokan energi dan sumber daya mineral bagi kebutuhan domestik kita.

Adapun 11 bidang kerjasama IJ-EPA yaitu:

1. *Trade in goods* (perdagangan)
2. *Rules of Origin* (peraturan dasar)
3. *Customs Procedure* (prosedur tentang ekspor impor dan Bea Cukai)
4. *Trade in Service* (perdagangan jasa)
5. *Investment* (investasi)
6. *Movement of natural Person* (pertumbuhan manusia)
7. *Government Procurement* (pengadaan pemerintah)
8. *Intellectual Proverty Rights* (hak kekayaan intelektual)
9. *Competition Policy* (kebijakan mengenai persaingan usaha)
10. *Energy and Mineral Resources* (sumber daya energi dan mineral)
11. *Cooperation* (kerjasama)

Inti dasar dari IJ-EPA adalah liberalisasi komprehensif antara negara adidaya ekonomi (Jepang) dengan negara yang masih mengalami krisis berkepanjangan

(Indonesia). Dimana, bentuk hubungan perdagangan bebas yang asimetris ini dinilai merugikan pihak yang lemah, IJ-EPA merupakan sebuah bentuk strategi keamanan Jepang, mengingat habisnya masa kontrak perjanjian jual-beli gas alam cair (LNG) yang akan jatuh sekitar tahun 2010-2011.(http://www.kompas2.com/kompas.cetak/0508/)

Isu utama energi nasional selama hampir satu decade terakhir adalah ketersediaan sumber bahan fosil yang semakin menurun dan pasokan bahan bakar. Minyak bumi yang selama ini menjadi sumber energi utama, cadangannya diperkirakan hanya dapat dieksploitasi hingga 10-15 tahun mendatang dengan tingkat laju ekstraksi saat ini dan tanpa penemuan sumber-sumber minyak baru yang bisa dieksploitasi secara ekonomis.

Melihat kondisi energi Nasional saat ini, tentunya kita akan mulai berpikir ulang tentang upaya pemanfaatan energi tersebut secara tepat dan berimbang. Selain itu tentunya kita juga tetap harus mengupayakan atau mengeksplorasi sumber energi terbarukan (bisa di upgrade, misalnya: air, angin, panas bumi, energi nabati) yang sangat melimpah di Negara kita sehingga penggunaan energi fosil (minyak bumi, batu bara, gas bumi) bias dikurangi. Dalam hal penggunaan energi terbarukan, salah satu solusi energi yang paling tepat adalah dengan menggunakan energi panas bumi (*geothermal*), mengingat energi ini ramah lingkungan.

Isu Energi mulai muncul pada pertemuan JSG (*Joint Study Group*) ke-2 di Bali, dimana pihak Jepang tertarik untuk melakukan Liberalisasi barang, jasa dan Investasi, disamping kerjasama fasilitasi. Pihak Jepang dalam JSG ke-2 di Bali

memberikan *List of Interest* (daftar penting) di subsektor migas, listrik, dan mineral, dan promosi proyek-proyek dibidang migas, kelistrikan, dan pengembangan infrastruktur jaringan gas.

Sejalan dengan ditanda-tanganinya IJ-EPA, sejumlah proyek energi pun ditanda-tangani :

- PLTU (Pembangkit Listrik tenaga Uap) Cirebon, Jawa Barat 1x600 MW, pelaksana PT.PLN & Marubeni, nilai 540 juta US$ (PPA)
- PLTU Piton 3-4, Jawa Timur 1x800 MW, pelaksana PT PLN & PEC, nilai 72 juta US (MoA)
- PLTPB (pembangkit listrik tenaga panas bumi) Sarulla, Sumatera Utara 300 MW pelaksana PT PLN, *Medco Energi Internasional*, Pertamina, *Ormat Internasional, Itochu Corp*, nilai 600 juta US$ (HoA)
- *Aderm for Cooperative Feasibility Study on Commercialization of Brown Coal Liquefaction,* Satui Kalimantan Selatan, pelaksana Balitbang ESDM, PT Bumi *Resources,* JBIC, *Kobe Steel, Sojitz Corp*, nilai 0,5 juta US$ (HoA)
- Proyek LPG, Indramayu Jabar pelaksana Pertamina & *Itochu Corp*, nilai 300 juta US$. (http://www.ptpjb.com/iframe_news_content.php?n=459. diakses 19 oktober 2008)

Sementara itu, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis listrik yang bisa dikatakan sudah berada dalam tahap yang mengkhawatirkan, di beberapa wilayah, selalu terjadi pemadaman bergilir, hal ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya kapasitas pembangkit, perseroan juga menghadapi keterbatasan kemampuan

membeli energi. Dengan keterbatasan itu, PLN tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penggunaan tenaga listrik. Kita lihat bahan bakar, baik BBM maupun batu bara, terus melejit. Akibatnya, rentang harga jual listrik dengan biaya produksi makin jauh, sementara anggaran untuk membeli bahan bakar dibatasi, dan yang paling sering mengalami pemadaman bergilir yaitu di wilayah Sumatera Utara yang selalu terjadi dalam beberapa tahun terakhir atau sejak tahun 2000, dan salah satu cara untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara, adalah dengan pembangunan PLTPB (pembangkit listrik tenaga panas bumi) Sarulla. (Jakarta, Kompas jum'at 27 Juni 2008).

Proyek pembangunan PLTPB terbesar di dunia di Sarulla, kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara oleh *PT Medco Energi Internasional, Itochu Corporation* (Jepang), dan *Ormat Technologies Co, Inc*. (AS), dan untuk setiap kwh listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN dengan harga $0,4622. Listrik yang dihasilkan diharapkan akan dapat memenuhi 1/3 dari kebutuhan listrik Propinsi Sumatera Utara. Pembangunan PLTPB Sarulla dapat menumbuhkan ekonomi baru khususnya kawasan Pahae, potensi panas bumi Sarulla juga mampu memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara.

PLTPB Sarulla adalah proyek yang tertunda selama hampir 15 tahun, bersama dengan Pertamina, UNOCAL (*United Oil of California*) sebuah perusahaan minyak Amerika, yang pernah dituntut di pengadilan karena pelanggaran HAM saat membangun pipa LNG *(Liquified Natural Gas*) dengan junta militer Birma tahun 1994 itu telah mulai proyek eksploitasi. Namun, proyek ini diberhentikan

karena krisis moneter oleh keppres no.39 tahun 1997. (http://www.sumutprov.go.id/lengkap.php, diakses 20 oktober 2008).

Proyek ini kemudian dibuka kembali dengan keppres no.15 tahun 2002 tetapi karena pengembangannya semakin membengkak, UNOCAL secara resmi menyatakan berhenti dari proyek. Pada bulan juli 2003 UNOCAL menjual proyek ini ke PLN dan menyatakan bahwa sebagai gantinya, Investasi yang telah dikeluarkan sebesar 60 juta dolar Amerika akan diganti oleh PLN. (http://www.sumutprov.go.id/lengkap.php, diakses 20 Oktober 2008)

Selain itu pun jalannya proyek ini juga tidak transparan. Pada tanggal 1 april 2004, Pertamina dan anak perusahan PLN, PT Geo Dipa Energi berhasil memenangkan tender PLN tetapi gagal dalam mengumpulkan investasi, hal ini di sebabkan tidak adanya Perusahaan Asuransi yang bersedia menjamin pencairan dana terhadap bank sebab daerah Sarulla terletak diatas patahan aktif gempa bumi. Akhirnya pada tanggal 25 Juli 2006 PLN mengirimkan LoI *(letter of increment*) ke konsorium Medco. Yang masuk dalam konsorium medco adalah medco energi Internasional milik Arifin panirogo (mantan ketua fraksi PDI-P), *Itochu Corforation* dan *Ormat Tecnologies* (perusahaan Amerika untuk alat-alat generator), dengan proporsi kepemilikan saham masing-masing 62,5%, 25%, 12.5%. Akan tetapi, pada bulan Oktober 2007, *Kyushu Electric Power* membeli saham medco sebanyak 25% dari total saham seingga perusahaan jepang menguasai setengah dari kepemilikan. (http://beritasore.com/krisis-listrik-di-sumut/, diakses 13 oktober 2008)

Kelanjutan proyek Sarulla yang merupakan hasil kerjasama dengan Investor Jepang yang diwakili Konsorium Medco, Itochu yang menggunakan dana *Japan Bank International* (JBIC) telah membantu membangun PLTPB Sarulla di Sumatera Utara. Itochu mempesentasikan, pendanaan dan pembangunan PLTPB Sarulla merupakan proyek panas bumi terbesar di dunia. Kerjasama ini memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun kesadaran menyiapkan sendiri suplai kebutuhan energi listrik dalam energi. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis kelistrikan yang membuat pemutusan arus listrik bergilir di sebagian besar wilayah Jawa dan Bali terus-menerus terjadi.

Berdasarkan paparan diatas, menimbulkan ketertarikan penulis untuk menguji fenomena bagaimana kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang dalam mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara dengan melihat studi kasus Proyek Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Sarulla di Sumatera Utara. Kajian ini akan dilaporkan melalui penelitian yang diberi Judul.

"**Peranan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) dalam mengatasi Krisis Listrik di Sumatera Utara**."

(Studi Kasus: Pembangunan PLTPB (pembangkit listrik tenaga panas bumi) Sarulla di Sumatera Utara)

Selanjutnya, Penelitian ini berhubungan dengan beberapa mata kuliah pada studi Hubungan Internasional, yaitu:

1. Ekonomi Politik Internasional

   Mata kuliah ini membantu memahami saling keterhubungan antara ekonomi Internasional dengan Politik Internasional.

2. Hubungan Internasional

   Mata kuliah ini membantu mempelajari interaksi baik *state* aktor (negara) maupun *non state* aktor (ekonomi, sosial, budaya, hankam, dsb)

3. Politik Internasional

   Mata kuliah ini membantu memberikan gambaran pengaruh luar-dalam dalam hal ini Indonesia dan Jepang.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengemukakan Identifikasi Masalah dalam bentuk pertanyaan:

1. Apa yang melatarbelakangi kerjasama EPA RI-Jepang?
2. Bagaimana kerjasama RI-Jepang dalam mengatasi krisis listrik melalui EPA?
3. Bagaimana Proyek pembuatan Pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla di Sumatera Utara?
4. Bagaimana Prospek kerjasama IJ-EPA dalam mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara?

1.3 Pembatasan masalah

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dibatasi hanya seputar kerjasama dalam Proyek kelistrikan Sarulla di Sumatera Utara. Termasuk perbandingan kedua negara itu dari sektor pertumbuhan ekonomi. Pembatasan masalah dilakukan karena bidang ekonomi memiliki cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada barang, jasa, dll. Batasan waktu yang digunakan dalam Penelitian ini berada dalam kurun waktu 2007-2008. Penetapan kurun waktu 2007-2008 diambil dengan pertimbangan IJ-EPA mulai ditandatangani pada tahun 2007, dan tahun 2008 adalah IJ-EPA mulai menangani krisis listrik di Sumatera Utara.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan Identifikasi dan Pembatasan Masalah, maka dirumuskan masalah Penelitian sebagai berikut:

"Bagaimana peranan kerjasama *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) dalam krisis kelistrikan di Sumatera Utara?"

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses penanganan krisis kelistrikan di Sumatera Utara oleh IJ-EPA (*RI-Japan Economic Partnership Agreement).*

1. Untuk mengetahui latar belakang kerjasama RI-Jepang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama RI-Jepang dalam mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara melalui IJ-EPA.
3. Untuk mengetahui bagaimana Proyek pembuatan pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla di Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui bagaimana prospek IJ-EPA dalam mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara.

1.6 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan, diharapkan hasil penelitian dapat mencapai kegunaan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana kedua negara yaitu Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama Ekonomi di bidang Energi.
2. Mampu memberikan Informasi dan data-data bagi para pembaca atau calon peneliti yang menaruh minat dalam memahami salah satu fenomena HI yaitu Ekonomi.
3. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai salah satu bentuk kebijakan ekonomi suatu negara, seperti Bantuan Luar Negeri Jepang kepada Indonesia.
4. Sebagai sumbangan Ilmu Pengetahuan yang berhubungan dengan Ekonomi Politik Internasional, Kerjasama Internasional.

5. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Strata satu (S-1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer (UNIKOM) Bandung.

1.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.7.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mengemukakan dasar pemikiran serta menggunakan anggapan dasar dari teori-teori para ahli yang mendukung dalam permasalahan tersebut. Fungsi dari kerangka pemikiran adalah untuk menentukan variable-variabel mana saja yang terlibat dalam penelitian tersebut. Dalam rangka konseptual ini penulis akan mengutip teori atau pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan aspek yang diteliti, tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan fondasi teoritis yang akan membantu untuk mengaplikasikan metode-metode yang akan digunakan untuk memahami fenomena-fenomena Hubungan Internasional khususnya bagi permasalahan yang diteliti.

Hubungan Internasional sebagai suatu disiplin ilmu selalu mempunyai gerak dinamika dan terus berkembang sehingga terdapat berbagai macam pendapat mengenai istilah itu sendiri. Hubungan Internasional untuk saat ini telah memasuki ruang lingkup yang sangat luas, yang mana tidak menitikberatkan pada sifat hubungan yang formal (Pemerintah) tetapi mencakup semua hal yang sifatnya lintas batas Nasional dari semua aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi Hubungan Internasional menurut Holsti di dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, yaitu :

> "Hubungan Internasional adalah semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang berbeda baik dengan atau tanpa pemerintah masing-masing. Hubungan ini mencakup suatu analisa mengenai Politik Luar negeri dan analisa politik antar negara". (1987:21)

Dengan demikian, pada hakekatnya Hubungan Internasional merupakan suatu bentuk interaksi perilaku baik antar negara, kelompok, maupun individu dalam berbagai macam karakteristik, maka melahirkan kerjasama Internasional. Sesuatu yang tidak mungkin suatu negara dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dalam era globalisasi pada saat ini. Seperti kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang selama ini relatif didasarkan pada ketergantungan diantara kedua negara tersebut.

Adapun konsep kerjasama menurut K.J.Holsti dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* menyatakan bahwa:

> "Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.". (1988:65)

Dengan melakukan kerjasama antar Negara diharapkan masing-masing pihak dapat melengkapi atau bahkan menutupi kekurangannya. Pentingnya

kerjasama digambarkan oleh Charles.H.Cooley dalam buku "*Sosiologi Suatu Pengantar*", sebagai berikut:

> "Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang ada saat bersamaan, mempunyai cukup pengaturan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Melalui kerjasama, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dengan adanya organisasi merupakan factor penting dalam kerjasama yang berguna". (1990:66)

Dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, suatu Negara tidak dapat menghindari dirinya dari ketergantungan (Interdependensi) terhadap Negara lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa Interdependensi lahir akibat dari semakin kompleksnya satu Negara lain dalam proses kehidupan bernegara.

Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya *Organisasi dan Administrasi Internasional mengungkapkan* bahwa : "Kerjasama Internasional merupakan keharusan sebagai akibat dari hubungan Interdepedensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masa Internasional". (1997:19)

Dalam Hubungan Internasional dikenal akan Hubungan Kerjasama antar Negara merupakan pertemuan beragam kepentingan Nasional dari beberapa Negara yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri.

Menurut T.May Rudi dalam bukunya *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*:"Kerjasama Bilateral adalah sebuah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen Individu untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan".(2003:5)

Dalam proses pelaksanaan Kerjasama Bilateral Spiegel menyatakan bahwa dapat ditemukan tiga motif, (1995:67):

1. Memelihara Kepentingan Nasional
2. Memelihara Perdamaian
3. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi.

Ilmu Ekonomi Internasional mengkaji saling ketergantungan antar Negara seperti yang diungkapkan menurut Nopirin dalam bukunya *Ekonomi Internasional* menyatakan bahwa:

> ”Seperti halnya Ilmu Ekonomi, Ekonomi Internasional mempelajari alokasi sumberdaya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia, hanya saja problematik ekonomi dipelajari dalam ruang lingkup Internasional artinya masalah alokasi dianalisa dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dengan negara lain. Ilmu ekonomi Internasional berusaha untuk mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumberdaya baik dua negara tersebut maupun antar beberapa negara, hubungan ekonomi Internasional ini dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama Internasional”.(1995:10)

Disamping kebijaksanaan ekonomi Internasional terdapat juga tujuan ekonomi Internasional, hal ini dijelaskan oleh R.E.A.Ma’moer dalam bukunya *Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, yaitu:

> “Tujuan Ekonomi Internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia, pelaksanaan ekonomi Internasional merupakan kerjasama antara bangsa-bangsa atau negara-negara. Dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan yang tak terpenuhi oleh persediaan didalam negeri dapat terpenuhi oleh negara lain.”. (1974:1)

Ekonomi sering muncul dalam pencaturan politik internasional bersama dengan globalisasi ekonomi dunia yang menciptakan persaingan perdagangan

antara bangsa yang semakin tajam. Negara yang unggul dalam bidang ekonomi dan perdagangan saja yang dapat manfaat yang besar dari globalisasi.

Sedangkan Ekonomi Politik menurut B.N.Marbun dalam *Kamus Politik*, adalah sebagai berikut :

> "Ekonomi Politik adalah penggunaan konsep ekonomi untuk memahami masalah-masalah politik yang dipakai untuk melihat proses politik atau peletakan dasar-dasar politik untuk pembelajaran sebagai akibat adanya tuntutan politik yang harus dipenuhi agar pembangunan ekonomi dapat berkembang".(1996:174)

Bagi Indonesia, Jepang telah lama menjadi Mitra Ekonomi paling penting dan Strategis, sehingga ditanda-tangani kerjasama IJ-EPA (*Indonesia-Jepang Economic Partnership*) pada tanggal 20 Agustus 2007, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abe. IJ-EPA merupakan kerjasama ekonomi Bilateral antara Indonesia dengan Jepang.

Dalam penelitian ini hubungan antar negara Indonesia dan Jepang menjadi lebih luas dan kompleks dimana telah terjadi hubungan saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain berdasarkan kondisi saling membutuhkan dan hubungan ini semakin kompleks dengan adanya faktor-faktor pendukung terjadinya kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang di bidang peningkatan investasi.

Adapun investasi tersebut menurut M.L.Jinghan dalam bukunya *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, dikatakan bahwa:

> "Investasi adalah setiap usaha adalah sektor-sektor tertentu dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan pada masa-masa mendatang, sedangkan bantuan luar negeri dalam setiap bantuan baik dalam bentuk modal maupun teknik dari salah satu pihak kepada pihak yang lain yang didasari dengan maksud-maksud tertentu, maksud moral dan kemanusiaan, politik, militer, maupun gabungan dari padanya".

Investasi atau penanaman modal asing adalah suatu modal bagi suatu negara, sedangkan modal asing tersebut dapat berbentuk modal swasta dengan investasi langsung ataupun dengan investasi tidak langsung. Seperti yang dikatakan B.N.Marbun dalam bukunya *Kamus Politik* sebagai berikut: "Modal asing adalah modal dari bangsa (negara) asing yang ditanam suatu negara dengan maksud memperoleh keuntungan yang cukup."

Sedangkan motif dari investasi itu sendiri, sebagaimana dikatakan Sumantoro dalam bukunya *Kerjasama Investasi Asing*, yaitu : "Motif dari penanam modal menginvestasikan modalnya ke luar negeri adalah mengambil keuntungan semaksimal mungkin, sedankan motif negara penerima modal adalah menarik penanam modal untuk tujuan membantu biaya pembangunan nasional."

Bila dikaji lebih mendalam, bahwa penanaman modal asing atau Foreign Investment merupakan aspek penting dalam melakukan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa : "Investasi pembangunan ekonomi itu sendiri meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilaksanakan antar negara atau individu dari suatu negara lainnya. Dua aspek penting adalah perdagangan ekonomi dan investasi". (J.Panglaykim)

Indonesia mempunyai Sumber Daya Alam yang melimpah, oleh karena itu banyak negara yang ingin berinvestasi, salah satunya adalah Jepang yang melakukan kerjasama di bidang Energi, dalam Pembangunan PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Sarulla dalam menangani krisis kelistrikan di Sumatera Utara, Proyek ini menggunakan energi Panas Bumi.

Sedangkan Energi menururt Dorling Kindersky dalam bukunya yang berjudul *My Science Book Of Energy* yaitu:

> "Energi adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan barbagai proses kegiatan termasuk bahan bakar, listrik, energi mekanik, dan panas. Sumber energi merupakan sebagian dari Sumber Daya Alam yang meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, air, panas bumi, gambut, biomassa, dsb".(1992:9)

Ditinjau dari segi ekonomi, energi dapat diklasifikasikan menjadi energi komersial dan energi nonkomersial. Hal ini dijelaskan oleh Daryanto dalam bukunya yang berjudul *Energi : masalah dan Pemanfaatannya bagi Kehidupan Manusia, yaitu:* "Energi Komersial adalah kelompok bentuk energi yang biasa atau umum yang diperdagangkan secara komersial misalnya minyak, listrik, gas, batubara, panas bumi, dll".(2007:11)

- **Jenis Energi**

Secara umum jenis energi dapat dikelompokkan menjadi enam kategori, antara lain :

- Energi Listrik

  Merupakan energi yang sangat mudah terpakai karena dapat dikonversi menjadi bentuk energi lain dengan mudah dan efisien. Energi listrik juga merupakan salah satu energi yang paling luas penggunaannya, keuntungannya mudah dalam pengaturan (regulasi) dan penyebaran (distribusi), bersih dan mempunyai efisiensi dan fleksibilitas yang sangat tinggi, pengiriman (suplai) dari pembangkit ke konsumen/pelanggan dalam bentuk yang konsisten, secara stimultan dan tidak terputus-putus. (Djali. A, 1993:3).

- Energi Elektromagnetik

  Energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Energi radiasi dinyatakan dalam satuan energi yang sangat kecil yakni *elektron volt* atau *mega elektrovolt*, digunakan pula sebagai evaluasi energi nuklir.

- Energi Nuklir

  Energi nuklir adalah energi dalam bentuk energi tersimpan yang biasa dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom, energi ini dilepas sebagai hasil usaha partikel-partikel untuk memperoleh kondisi yang lebih stabil.

- Energi Panas (Thermal)

  Energi thermal merupakan bentuk energi dasar dimana dalam kata lain adalah semua energi yang dapat dikonversikan secara penuh menjadi energi panas, sebaliknya pengonversian dari energi lain dibatasi oleh hokum termodinamika. Bentuk energi transisi dan energi thermal adalah energi panas, dapat pula dalam bentuk energi transisi dan energithermal adalah energi panas, dapat pula dalam bentuk energi tersimpan sebagai kalor latent atau kalor sensible yang berupa enthapi.(Daryanto, *Energi: Masalah dan Pemanfaatannya bagi Kehidupan Manusia* 2007:14).

Menurut tingkat pemanfaatannya, energi dapat dibagi menjadi energi *primer*, energi *sekunder*, energi *final* dan energi bermanfaat. Energi *primer* adalah energi yang diperoleh secara langsung dari alam, seperti minyak mentah, gas

bumi, batu bara, tenaga air, panas bumi, mineral radioaktif, angin, pasang surut, kayu bakar, sampah, dan lain-lainnya.

Energi *sekunder* adalah energi yang berasal dari energi primer yang telah diubah melalui proses teknologi menjadi bentuk energi yang lebih mudah/praktis digunakan, misalnya minyak tanah, listrik, gas buatan, kokas, arang, briket batu bara, dan lain-lin. Energi *final* adalah energi yang dimanfaatkan oleh pemakai energi akhir, contohnya energi listrik. Energi bermanfaat adalah energi dalam bentuk panas, cahaya dan lain-lain yang langsung dimanfaatkan oleh manusia.

Ditinjau dari segi ekonomi, energi dapat diklasifikasikan menjadi energi komersial dan energi nonkomersial. Energi komersial adalah kelompok bentuk energi yang biasa atau umum yang diperdagangkan secara komersial, misalnya minyak, listrik, gas, batu bara, dan lain-lain. Energi nonkomersial adalah kelompok bentuk energi yang tidak biasa diperdagangkan misalnya kayu, arang, sampah, jerami dan lain-lain.

- **Sumber Energi**

a. Sumber-sumber Energi yang dapat habis terpakai

Sumber-sumber energi yang dapat habis pakai dan langka daur ulang (tidak bisa didaur ulang) yang berasal dari bumi (terrestrial) adalah sumber-sumber energi yang konvensional yang pada umumnya merupakan energi tambang atau energi fosil yang berasal dari perut bumi, seperti minyak, gas dan batu bara. Khususnya bahan bakar minyak akan segera habis paling lambat pada

akhir ke-21, kemudian gas alam diprediksi para ahli akan habis dalam kurun waktu kurang lebih 200 sampai dengan 300 tahun yang akan datang.

b. Sumber Energi yang dapat didaur ulang (terbarukan)

Sumber energi terbarukan dapat digunakan tanpa dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak akan pernah habis karena dapat dipulihkan dalam waktu relatif singkat, misalnya, tenaga air, panas bumi dan sinar matahari langsung. Ini dapat dibedakan berdasarkan sumber energi yang dapat didaur ulang (*renewable*) seperti biomassa, biogas serta kayu bakar, dan sumber-sumber energi yang tidak habis sepanjang masa (*non depleted)* seperti sumber panas bumi yang berasal dari perut bumi *(terrestrial*) dan yang dari luar bumi (*ekstraterrestrial)* adalah energi matahari yang dapat dimanfaatkan secara langsung (*photo voltaic*) dan secara tidak langsung (*radition energy).*

Sedangkan, pengertian Panas Bumi menurut **Tim Kingfisher** dalam bukunya *Hamparan Dunia Ilmu: Energi dan Fisika* adalah:

> "Panas bumi adalah sumber energi yang berasal dari dalam perut bumi. Secara alami di dalam perut bumi terdapat energi panas yang mengalir (magma) ke permukaan bumi, ini dapat dimanfaatkan dalam bentuk uap panas yang langsung dapat digunakan sebagai sumber energi, misalnya untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB). Panas bumi adalah sumber enrgi yang tidak dapat dipindahkan (dialirkan). Di Indonesia terdapat banyak gunung berapi, oleh karena itu sangat tepat bila digunakan panas bumi sebagai sumber energi seperti yang terjadi di Sumatera Utara dalam Proyek Pembuatan Listrik Tenaga panas Bumi."(1998:15)

Pemanfaatan Energi Panas Bumi (*geothermal*) ditemukan pertama kali sejak 2000 tahun yang lalu di Italia. Pada tahun 1904 barulah diadakan pemanfaatan energi geothermal penghasil tenaga listrik secara percobaan di Italia,

kemudian baru tahun 1913 suatu generator berkekuatan 250 kW dibuat secara permanen.

Sumberdaya Panas Bumi pada prinsipnya bumi merupakan pecahan yang terlempar dari matahari, karena itu bumi masih memiliki suatu inti yang panas sekali dan meleleh. Bumi juga mengandung banyak bahan radioaktif seperti uranium-238, uranium-235, dan thorium-232. Sebagaimana halnya dalam inti sebuah reaktor nuklir, kegiatan bahan-bahan radioaktif ini membangkitkan jumlah panas yang tinggi yang berusaha untuk keluar dan mencapai permukaan bumi. Semua energi panas bumi ini sering tampak dipermukaan bumi dalam bentuk semburan air panas, uap panas dan sumber air belerang Prinsip kerja pembangkit listik tenaga panas bumi secara singkst adalah sbb :
Air panas yang berasal dari sumur akan disalurkan ke separator, oleh separator air dengan uap dipisahkan, kemudian uap akan digunakan untuk menggerakkan turbin.

Ada dua sistim dalam pembangkit ini yaitu :

1. *Simple flash* (kilas nyala tunggal)

2. *Double flash* (kilas nyala ganda)

Dapat dikemukakan bahwa sistim *double flash* adalah 15-20 % lebih produktif dengan sumur yang sama dibanding dengan *simple flash*.

Indonesia terletak di dalam rangkaian gunung berapi yang dikenal sebagai daerah cincin api. Banyak terdapat jalur magma (batuan cair) yang terletak dekat dengan permukaan bumi dan akan memanaskan batuan-batuan di sekitarnya.

Sebagai akibatnya air di beberapa banyak tempat bersentuhan dengan batuan panas, dimana sebagian muncul ke permukaan bumi sebagai sumber air ataupun uap panas, air dan uap panas inilah yang kemudian disebut sebagai sumber energi panas bumi, seperti halnya dengan tenaga air, panas bumi tergolong sebagai sumber daya energi yang terbarukan (dapat di daur ulang). Diperkirakan bahwa sumber daya panas bumi indonesia adalah 16000 MW, dengan penyebaran di Sumatera 4900 MW, Jawa dan Bali 8100 MW, dan Sulawesi 1500 MW.

Menurut Dra. Herawati dalam bukunya *Energi dan Pengelolaannya*, Energi Panas bumi adalah: " Energi panas bumi, merupakan sumber energi yang tidak pernah habis-habisnya sepanjang masa selama tata surya ini berfungsi normal sesuai dengan peredarannya"(1993:9).

Pemanfaatan Energi panas bumi (*geothermal*) ditemukan pertama kali sejak 2000 tahun yang lalu di Italia. Pada tahun 1904 barulah diadakan pemanfaatan energi geothermal penghasil tenaga listrik secara percobaan di Italia, kemudian baru tahun 1913 suatu generator berkekuatan 250 kW dibuat secara permanen. Pemanfaatan energi dunia dari energi *geothermal* sampai dengan tahun 1972 telah mencapai 1 gigawatt didukung antara lain dari Italia sebesar 365 MW.

Selain kegunaan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik, energi panas dapat dimanfaatkan sebagai:

- Pemanas kolam air untuk proses tradisional
- Pemanas ruangan rumah tangga maupun rumah kaca
- Proses pemanas bahan pulp untuk pabrik kertas di New Zealand

- Untuk pengering diatomite di Iceland
- Proses pengolahan produk kimia untuk es kering dan kalsium chloride di Amerika Serikat
- Produk Borax di Italia.

Pemanfaatan energi dunia dari energi geothermal sampai dengan tahun1972 telah mencapai 1 gigawatt didukung antara lain dari Italia sebesar 365 MW.

Potensi Energi Panas Bumi di Sumatera Utara

No	Lapangan	Kabupaten	RES (Mwe)		RE (Mwe)			Ins
			Sp	Hp	Ps	Pb	Pv	(MW)
1	Beras Tepu	Karo	-	-	-	-	-	-
2	LauDebukDebukSibayak	Karo	-	70	131	-	30	2
3	Marike	Karo	25	-	-	-	-	-
4	Dolok Merawan	Simalungun	225	-	-	-	-	-
5	Pusuk Buhit D. Toba	Samosir	225	-	-	-	-	-
6	Simbolon Samosir	Samosir	225	-	-	-	-	-
7	Pagaran	Taput	225	-	-	-	-	-
8	Hela Toba	Taput	25	-	-	-	-	-
9	Sarulla	Taput	-	100	200	-	135	-
10	Namorailangit	Taput	-	-	-	-	210	-
11	Sipoholon Ria-Ria	Tapsel	225	-	-	-	-	-
12	Sibual-Buali	Tapsel	-	-	556	-	-	-
13	Sibuhuan	Padang Lawas	100	-	-	-	-	-
14	S. Merapi Sampuraga	Madina	-	-	420**	-	-	-
15	Sampuraga	Madina	225	-	-	-	-	-
16	Roburan	Madina	-	-	320	-	-	-

Keterangan : (sumber:http://sumutprov.go.id/skpd/dinaspertambangan/ index.php)

Sp : Speculative **Res : Resources/Sumberdaya**

Hp : Hypothetical

Ps : Possible/mungkin

Pb : Probable/terduga

Pv : Proven/terbukti

2.5 Energi Listrik

Ketersediaan energi merupakan syarat mutlak untuk melakukan aktivitas, tanpa energi yang memadai maka aktivitas yang dilakukan akan sangat terbatas. Dalam kaitannya dengan penyediaan energi listrik, kita bisa menggunakan Energi yang melimpah di negara kita misalnya, energi air, panas bumi, batu bara, angin, matahari dan sebagainya.

Pengertian energi listrik menurut Djali Ahimsa dengan judul buku *Prospek Energi Listrik dimasa Mendatang* adalah :

> "Energi Listrik adalah energi yang sangat mudah terpakai karena dapat dikonversik menjadi bentuk energi lain dengan mudah dan efisien. Energi listrik juga merupakan salah satu energi yang paling luas penggunaannya, keuntungannya mudah dalam pengaturan dan penyebarannya" (1993:3).

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan premier bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Namun, sejak periode tahun 2000 Indonesia telah mengalami krisis energi.

Krisis listrik merupakan fenomena yang melanda daerah Sumatera Utara maupun Medan Metropolitan saat ini. Ini terjadi karena tidak adanya kepedulian dari PT PLN ataupun dari pemerintah kota Medan. Demikian juga dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara yang tidak melakukan pengawasan khusus, dilihat dari kepentingan daerah Sumatera Utara Pemerintah Sumatera Utara maupun pemerintah kota Medan telah lalai melakukan pengawasan terhadap infrastruktur (listrik) yang ada di daerahnya.

Inilah pangkal bencana listrik di Sumatera Utara. Tak satu pun dari oknum maupun lembaga di atas yang mengerti mengapa perusahaan listrik harus dioperasikan oleh negara.

PT PLN kelihatannya tidak peduli dengan pertambahan kebutuhan listrik pelanggannya, baik untuk industri maupun untuk konsumen rumah tangga. Mereka tidak melihat bahwa kemajuan budaya (pendidikan, pekerjaan, gaya hidup) dan ekonomi (industri dan jasa) warga Medan mempunyai konsekuensi pada peningkatan kebutuhan listrik. PT PLN sama sekali tidak *responsive* (bertanggung jawab) terhadap perkembangan permintaan pelanggan. Ketidakpedulian seperti ini tidak biasa dilakukan oleh sebuah badan usaha. Apalagi jika badan usaha itu adalah miliknya swasta.

Responsiveness perusahaan swasta sangat tinggi. Sebuah badan usaha berkembang kalau permintaan terhadap barang yang dihasilkannya juga meningkat. Kejadian yang menyangkut pada PT PLN tidak demikian. Kebutuhan dan permintaan akan energi listrik tidak didukung oleh penambahan sumber energi listrik. Hal inilah yang membuat PT PLN tidak berkembang dari masa ke masa.

Demikian juga dengan pemerintah kota Medan. Perkembangan fisik kota terus dipacu, industri manufaktur terus diundang untuk membuka usaha tapi persediaan listrik tidak diperhatikan. Penyediaan pasokan listrik memang bukan tugasnya pemerintah kota tapi sebagai pemakai yang bernama metropolitan haruslah ikut bertanggung jawab atas penyediaan pasokan listrik dengan ikut berpartisipasi di dalam pembelian mesin pembangkit.

Jika PT PLN harus peduli dengan pelanggan maka pemerintah kota harus peduli dengan warganya. Namun, keduanya nihil akan hal ini. Pelanggan maupun warga bosan dan kecewa mendengar berbagai alasan pembelaan diri pihak penyedia pasokan listrik. Yang dikehendaki pelanggan adalah apa upaya yang dapat ditempuh oleh PT PLN dan pemerintah kota Medan bagi mengatasi krisis ini. Semua pelanggan tahu Medan metropolitan kekurangan pasokan listrik tetapi apa upaya yang terpikirkan oleh PT PLN bagi mengatasi masalah ini.

Apakah karena manajemen kelistrikan yang kacau mengharuskan pengusaha dan warga menanggung beban seperti ini. Ini tentu tidak adil. Membeli energi listrik tidak seperti membeli baju atau sepatu di toko. Toko boleh tidak menjual baju atau sepatu tetapi PT PLN tidak boleh tidak menjual listrik. Energi listrik adalah kebutuhan pokok. Tidak ada anggota masyarakat yang tidak bersentuhan dengan listrik. Apalagi di zaman kemajuan budaya, kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi. Itulah sebabnya mengapa perusahaan listrik dioperasikan oleh negara. Antara lain agar pasokan listrik terjamin. Bukan karena asetnya adalah milik negara.

Dalam kerangka EPA, Jakarta dan Tokyo menyiapkan kontrak pembangunan sejumlah proyek bernilai US$10 miliar. Dari nilai ini, sekitar US$4 miliar merupakan proyek energi. Proyek yang akan ditawarkan itu yaitu, PLTU Cirebon (600 MW) dan PLTPB Sarulla (10 MW), selain kesepakatan pengambilalihan saham *up-steram* Donggi antara Medco dan Mitsubushi. Sementara itu, yang juga akan diterjuni investor Jepang yaitu, Investasi dibidang energi, termasuk biofuel dalam kerangka *energy secure* di bidang prasarana, dan

jasa dengan aliran terbesar, seperti untuk sektor perdagangan, transportasi, *real estate* dan asuransi, serta di bidng pertanian, perikanan dan kehutanan (kemitraan dengan UKM).

Berdasarkan data *foreign direct investment* (FDI) Jepang di luar negeri, khususnya Asia, Indonesia berada di peringkat ketujuh dengan tren pertumbuhan sekitar 10,3%. Dengan ditandatanganinya IJ-EPA, tren pertumbuhan investasi Jepang di Indonesia diharapkan meningkat di atas 15%, seperti halnya di Thailand dan Korea Selatan. Hal ini karena pertumbuhannya relatif rendah, bahkan sejak krisis ekonomi 1998, trennya terus menurun.

Dengan IJ-EPA diyakini dapat menjaga investasi Jepang tidak pindah ke negara lain, terutama setelah diberlakukannya AFTA *(Asean Free Trade Area*) pada 2010. bahkan setelah ditandatanganinya kesepakatan itu diharapkan dapat memacu investasi baru yang mendukung sector penggerak di industri manufaktur melalui MIDEC dalam proses teknologi, *quality control* dan standar mutu, informasi pasar, dsb. Namun, keuntungan maksimal dari IJ-EPA juga sangat tergantung pada minat dan antusiasme pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas perjanjian itu, selain implementasi dari peningkatan kapasitas yang optimal. Peran pemerintah dalam IJ-EPA sesungguhnya hanya sebagai penghela dan fasilitator, karena begitu banyaknya batasan yang membelenggu pemerintah. Hal ini terbukti dari cukup alotnya perundingan selama ini. Karena itu, keterlibatan dunia usaha penting bagi terealisasinya kesepakatan IJ-EPA. Banyak yang harus dikerjakan untuk mengimplementasikan peningkatan kapasitas, sehingga Indonesia perlu aktif menentukan skala prioritas dalam mengajukan permintaan

capacitybuilding.(http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/suplemen/detail.php?cid=1&id=19088&pageNum=2).

Dalam paparan diatas kita bisa melihat adanya peranan IJ-EPA dalam mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara.

Untuk dapat memahami hal tersebut, peneliti menuangkan dengan menyertakan beberapa gambaran mengenai peranan itu sendiri. Soedjono Soekanto menyatakan bahwa peranan (*role*),adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peranan yang khas adalah *regional defender* yang menunjukkan peranan suatu Negara dalam melindungi Negara lain di kawasan tertentu, atau mediator (pengantar) yang menunjukkan peranan suatu Negara dalam membantu penyelesaian masalah Internasional.

1.7.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan dimana materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berfikir yang dikembangkan. (Suriasumantri, 1996:12).

Dari uraian kerangka pemikiran dan asumsi dasar diatas, maka dapat disusun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Jepang melalui IJ-EPA berperan dalam upaya mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara dalam bentuk Pembangunan Proyek PLTPB Sarulla”.

1.7.3 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah Serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan, jika kita hendak mengetahui eksistensi empiris suatu konsep. Melalui definisi seperti itu, maka suatu konsep dapat dijabarkan. Dengan demikian maka Definisi Operasional berarti juga menjabarkan prosedur pengujian yang memberikan kriteria bagi penerapan konsep itu secara empiris. (Mas'oed dan Mcandrews 1978:100)

Mengacu pada pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, yang akan dijabarkan disini adalah variable Independen yang dalam hal ini adalah Peranan IJ-EPA dan Variabel dependen yaitu krisis listrik.

Variabel Independen, yaitu peranan IJ-EPA konsesi mengenai Variabel peranan IJ-EPA terdiri atas:

- Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari Individu, kelompok ataupun struktur yang menduduki suatu posisi dalam system yang ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, serta oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peran tadi, sehingga apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu Peranan.
- Kerjasama Ekonomi adalah suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah ekonomi yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain.

- IJ-EPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement)* merupakan kerjasama ekonomi Bilateral antara Indonesia dengan Jepang.
- PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Sarulla adalah Proyek pembangunan PLTPB Sarulla, di Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara oleh PT Medco Energi Internasional, *Itochu Corporation* (Jepang), *Kyushu Electric Power Co, Inc.* (Jepang), dan *Ormat Technologies Co, Inc* (Amerika Serikat).PLTPB Sarulla ini, dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik di Propinsi Sumatera Utara.

Variabel Dependen yaitu, Krisis listrik di Sumatera Utara. Konsesi mengenai Krisis listrik didasarkan pada pemahaman terhadap Krisis listrik, yaitu:

- Krisis listrik merupakan adanya keterbatasan pasokan energi sehingga mengakibatkan adanya krisis energi, dimana energi tersebut digunakan untuk memasok listrik misalnya, energi panas bumi.

1.8 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.8.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Deskripsi adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta tentang fenomena yang ada. Sementara itu metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau suatu masalah yang diteliti dalam situasi tertentu. Sementara itu,

analitis disini diartikan sebagai suatu proses penggunaan beberapa kerangka kerja yang terorganisir terhadap informasi yang diterima. (Coplin, 1984:2)

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen dan kepustakaan dengan sumber-sumber dari buku-buku, jurnal, ensiklopedi, Internet, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Dengan demikian, data yang diperoleh adalah data Sekunder.

1.9 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada sumber data yang cukup memadai, antara lain:

1. Perpustakaan FISIP HI UNIKOM di jalan Dipati Ukur
2. Perpustakaan FISIP HI Unpas di jalan Lengkong besar
3. Perpustakaan FISIP HI Unpar di jalan Ciumbuleuit

Penelitian ini memakan waktu :

No	Kegiatan	Tahun	Waktu Penelitian					
			Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan judul	2008						
2	Bimbingan skripsi	2008						
3	Rencana UP	2008						
4	Rencana Sidang	2009						

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I : Pada Bab ini diuraikan masalah yang melatarbelakangi diajukannya penelitian ini. Uraian dimulai dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian kegunaan penelitian kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan lokasi penelitian dilangsungkan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, berisi teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori-teori yang dikemukakan pada bab ini akan diuraikan lebih lanjut dan diterapkan dalam penganalisaan sehingga melahirkan kesimpulan yang benar dalam penelitian ini.

BAB III : Diuraikan mengenai variable-variabel yang digunakan pada penelitian, variable dependen: peranan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang dan variable dependen: dibidang eksplorasi sumber daya alam.

BAB IV : Bab ini, berisi analisa proses penanganan krisis kelistrikan di sumatera utara melalui IJ-EPA.

BAB V : Dalam bab ini ditarik sejumlah kesimpulan yang akan membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

DAFTAR ISI

LEMBAR

PENGESAHAN……..i

DAFTAR

ISI……...ii

BAB I

PENDAHULUAN……1

1.1 Latar

Belakang…….1

2

1.2 Identifikasi

Masalah…….13

1.3 Pembatasan

Masalah……13

1.4 Perumusan

Masalah…….13

1.5 Tujuan

Penelitian…….14

1.6 Kegunaan

Penelitian……14

1.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

…….15

1.7.1 Kerangka

Pemikiran……...15

1.7.2 Hipotesis……

……24

1.8 Metode dan Teknik Pengumpulan

Data……...25

1.8.1 Metode

Penelitian…….25

1.8.2 Teknik Pengumpulan

Data……26

1.9 Lokasi dan Lama

Penelitian…….26

1.10 Sistematika

Penulisan……26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

2.1.1 Paradigma dalam Hubungan Internasional

2.1.1.1 Paradigma Pluralis (Pluralism)

2.2 Kerjasama Internasional

2.2.1 Kerjasama Bilateral

2.3 Ekonomi Politik Internasional

2.3.1 Bantuan Luar negeri

2.3.2 Investasi

2.3.3 Teori saling ketergantungan (interdepedensi)

2.4 Energi

2.4.1 Jenis Energi

2.4.2 Sumber Energi

2.4.3 Energi Panas Bumi

2.5 Energi Listrik

BAB III OBJEK PENELITIAN

3.1 Economic Partnership Agreement (EPA)

3.2 Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)

latar Belakang IJ-EPA

Tinjauan Umum

Tujuan IJ-EPA

Bidang Kerjasama IJ-EPA

3.2.4.1 Trade In Goods (perdagangan)

3.2.4.2 Rules of Origin (peraturan dasar)

3.2.4.3 Custom Procedure (prosedur ekspor impor dan bea cukai)

3.2.4.4 Trade in Service (perdagangan Jasa)

3.2.4.5 Investment (investasi)

3.2.4.6 Movement of natural Person (pergerakan alami manusia)

3.2.4.7 Government Procurement (pengadaan pemerintah)

3.2.4.8 Intellectual Proverty Rights (hak milik intelektual)

3.2.4.9 Competition Policy (kebijakan mengenai persaingan usaha)

3.2.4.10 Energy and Mineral Resources (sumber daya energi dan mineral)

3.2.4.11 Cooperation (kerjasama)

3.3 Gambaran Sumatera Utara

3.3.1 Sumber daya Alam di Sumatera Utara

3.4 Krisis Listrik di Sumatera Utara

3.4.1 Latar belakang krisis listrik

3.4.2 Proyek PLTPB Sarulla

3.5 Energi Terbarukan

3.5.1 Prioritas Panas bumi

3.5.2 Diplomasi dan Pendekatan Energi Jepang

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Ketahanan Energi nasional

4.1.1 Energi Terbarukan

4.1.2 Prioritas panas Bumi

4.2 Keterlibatan IJ-EPA Dalam Upaya Mengatasi Krisis Listrik di Sumatera Utara

4.3 Pelaksanaan Proyek PLTPB Sarulla

4.3.1 Konsorsium Proyek PLTPB Sarulla

4.3.1.1 Latar Belakang

4.3.1.2 Rencana Kedepan

4.3.2 Dampak Negatif dan Positif

4.4 Prospek kerjasama IJ-EPA dalam mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR

PUSTAKA……28

“PERANAN KERJASAMA EKONOMI ANTARA INDONESIA DAN JEPANG (IJ-EPA) DALAM EKSPLORASI SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA”
(Studi Kasus: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla di Sumatera Utara)

PROPOSAL PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Oleh:
Widiana Puspitasari
Nim.44304011

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
BANDUNG
2008